



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3091-3101

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Dampak Konflik Sudan Terhadap Perekonomian Dan Mahasiswa Indonesia Yang Beasiswa di Sudan

Ahmad Fuadi Tanjung<sup>1✉</sup>, Raju Adha<sup>2</sup>, Maryam Batubara<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [ahmadfuaditj@gmail.com](mailto:ahmadfuaditj@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Konflik di Sudan memiliki dampak kompleks terutama pada sektor ekonomi di negara tersebut dan juga berdampak secara global. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan mungkin menghadapi tantangan tambahan akibat situasi konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak konflik Sudan terhadap perekonomian lokal dan mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti penurunan signifikan dalam inflasi tahunan Sudan pada tahun 2022, dipicu oleh kekurangan pasokan dan faktor impor. LPT PBNU memberikan opsi studi di dalam negeri sebagai alternatif yang lebih efisien untuk menghindari konflik. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang situasi ekonomi dan pendidikan di Sudan akibat konflik.

Kata Kunci: *Konflik Sudan, Dampak Ekonomi, Mahasiswa Indonesia*

### Abstract

The conflict in Sudan has had a complex impact especially on the economic sectors in the country and also has an impact globally. Indonesian students studying in Sudan may face additional challenges due to conflict situations. This research uses a qualitative approach that uses the literature study method. This study aims to evaluate the impact of Sudan's conflict on the local economy and Indonesian students studying there. Using the literature study method, the study highlights a significant decline in Sudan's annual inflation in 2022, triggered by supply shortages and import factors. LPT PBNU provides study options in the country as a more efficient alternative to avoid conflict. The findings provide important insights into the economic and educational situation in Sudan as a result of the conflict.

Keywords: *Sudan Conflict, Economic Impact, Indonesian Students*

## PENDAHULUAN

Sudan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Sudan, adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur laut benua Afrika. Sebelum terjadinya referendum yang membagi Sudan menjadi dua bagian, negara ini adalah negara terbesar di wilayah Afrika dan dunia Arab, serta menjadi negara terbesar kesepuluh di dunia (Mulyanti, 2018). Dari segi geografis, Sudan masuk ke dalam sub-regionalisme Maghrib. Maghrib adalah wilayah yang mencakup sebagian besar wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah yang terletak di bagian utara benua Afrika. Wilayah Maghrib terdiri dari Maghrib Aqsha (paling barat), Maghrib Wusta (tengah), dan Maghrib Adna (paling timur). Dalam konteks klasifikasi sub-regional, Sudan dapat dikategorikan sebagai bagian dari sub-regionalisme Maghrib Adna (Jatmika, 2015).

Secara geografis, Sudan terletak di antara garis lintang 4° hingga 23° di utara dan garis bujur 22° hingga 38° di timur. Luas total Sudan adalah sekitar 1.882.000 kilometer persegi, yang merupakan sekitar 8,3% dari total luas benua Afrika. Luas wilayah perairan dan sungai di Sudan mencapai 129.813 kilometer persegi, sedangkan luas daratan mencapai 1.752.187 kilometer persegi (Taskiyah dan Meigen, 2021).

Berdasarkan agama dan etnis yang berlaku di wilayah Sudan, penduduk Sudan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara. Di Sudan Utara, sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan memiliki latar belakang etnis Arab. Sementara itu, penduduk Sudan Selatan, yang merupakan wilayah terpisah setelah referendum, mayoritas beragama Kristen dan menganut kepercayaan animisme, dengan akar etnis yang berpusat di budaya Afrika. Negara Sudan berbatasan dengan Mesir di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur laut, Kongo dan Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut.

Keragaman geografis Sudan memainkan peran penting dalam sumber konflik di negara ini, termasuk konflik di wilayah perbatasan. Ibukota Sudan, yaitu Khartoum, terletak di tempat pertemuan dua sungai besar, yaitu Nil Putih dan Nil Biru. Keberagaman agama, etnis, dan geografis di Sudan telah menjadi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika sosial dan politik di negara ini selama beberapa tahun.

Perang dalam sosiologi adalah konflik yang bisa menyebabkan kekacauan dalam kehidupan bersama. Ini terjadi karena ada pertentangan yang membuat hubungan sosial menjadi rusak. Dampaknya melibatkan keretakan hubungan, kehilangan nyawa, harta, trauma, dan menghambat perkembangan individu yang terkena dampaknya. Secara umum, perang bisa diartikan sebagai usaha untuk menguasai wilayah, baik melalui tindakan fisik maupun non-fisik. Di zaman dulu, perang seringkali terkait dengan pertikaian bersenjata, tetapi sekarang lebih banyak berfokus pada teknologi dan industri (Sarsito, 2009).

Dalam perspektif Islam kontemporer, pandangan ini mengacu pada pembagian dunia yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Islam memandang dunia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu darul Islam, Darul Sulh, dan Darul Kufr. Menurut Qardhawi, semua negara di dunia, kecuali Israel, merupakan wilayah perjanjian. Hal ini karena semua negara terikat oleh satu perjanjian dunia, yaitu Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana semua negara menjadi anggota. Saat ini, terdapat berbagai kesepakatan antara negara-negara Islam dan banyak negara di dunia dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan pembangunan. Kesepakatan-kesepakatan ini, dalam segala bentuknya, mengharuskan setiap anggotanya untuk menghormati dan melaksanakannya.

Konflik dan peperangan adalah realitas yang telah melintasi sejarah manusia dan tampaknya sulit dihindari. Perang adalah komponen sejarah kemanusiaan yang tidak dapat dihapuskan, dan konflik bersenjata selalu ada dalam perjalanan manusia. Konflik bersenjata atau perang memiliki dampak yang sangat luas dan seringkali tidak membawa manfaat positif apa pun bagi umat manusia, kecuali penderitaan dan kerugian. Perang mendekatkan manusia pada kematian dan tindakan kekerasan. Konflik yang memicu perang sering kali menghasilkan banyak korban dan mengakibatkan kerugian yang besar akibat tindakan perang (Aslamiyah, 2016).

Pada bulan Oktober 2021, sebuah kudeta terjadi di Sudan yang menargetkan Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan melibatkan sejumlah pejabat pemerintah yang dipimpin oleh pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah. Sementara itu, tentara Sudan berkomitmen untuk melanjutkan proses transisi menuju demokrasi dengan tujuan mengalihkan kekuasaan ke tangan pemerintahan sipil yang terpilih. Dalam konteks ini, pemimpin Pasukan Reaksi Cepat Sudan (*Rapid Support Forces*, RSF), Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, juga memiliki peran dalam pemerintahan pasca-kudeta. Namun, RSF menolak untuk menyerahkan kendali negara kepada pemerintahan sipil. Selain itu, terdapat ketentuan yang mencakup penggabungan sekitar 100.000 anggota RSF ke dalam struktur militer yang lebih besar, yang mengarah pada kemungkinan adanya kepemimpinan ganda dalam kelompok ini. Beberapa anggota RSF juga ditangkap karena dianggap sebagai ancaman militer.

Rapid Support Forces (RSF) adalah sebuah kekuatan militer yang awalnya terbentuk dan dioperasikan oleh Pemerintah Sudan. Pada awalnya dikenal sebagai Janjaweed, milisi RSF dikerahkan oleh pemerintah Sudan selama perang di Darfur, wilayah barat Sudan. Pada tahun 2019, mantan pemimpin otoriter Sudan, Omar al-Bashir, menggunakan RSF untuk membantu militer dalam menekan pemberontakan sipil. Pada saat itu, situasi militer di Sudan terutama terdiri dari angkatan udara yang kuat dan peralatan berat, sementara

tentara Sudan menghadapi kesulitan dalam mengendalikan wilayah pedesaan yang luas dan terpengaruh oleh perang di Darfur. Oleh karena itu, pemerintah Sudan mengirimkan milisi Janjaweed, yang kemudian bertransformasi menjadi Pasukan Reaksi Cepat (RSF) yang lebih resmi, pada tahun 2010-an. Selama masa pemerintahan Bashir, RSF mendapatkan dukungan finansial yang signifikan, membuat para komandan RSF menjadi kaya dan berpengaruh.

Isu korban jiwa dalam konteks konflik dan perang melibatkan baik korban militer maupun korban sipil. Hingga saat ini, korban militer dalam konflik bersenjata sering dianggap sebagai hasil yang tak terhindarkan dari keadaan tersebut, sedangkan korban sipil dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya dihindari. Masyarakat sipil, yang biasanya tidak terlibat senjata dan tidak terlibat dalam konflik, seharusnya diberikan perlindungan dan keamanan. Sangat mengkhawatirkan ketika masyarakat sipil malah dieksploitasi untuk kepentingan strategis dan politik dalam konflik, dengan mengorbankan hak-hak dan keamanan warga negara.

Konflik ini telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan, dan terutama mempengaruhi kehidupan penduduk setempat. Selain penduduk Sudan, kelompok lain yang turut merasakan dampaknya adalah mahasiswa asing yang belajar di negara tersebut, termasuk mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa untuk mengejar pendidikan tinggi (Aslamiyah, 2016).

Mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa untuk belajar di Sudan adalah contoh dari program kerjasama pendidikan yang bertujuan untuk memajukan potensi intelektual bangsa. Namun, situasi konflik yang tidak stabil di Sudan telah memunculkan berbagai masalah dan dampak yang signifikan pada kehidupan mahasiswa Indonesia yang sedang mengejar pendidikan mereka di sana. Latar belakang ini menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini. Perang saudara di Sudan telah mengakibatkan ketidakpastian, bahaya, serta perubahan drastis dalam lingkungan di mana mahasiswa Indonesia harus belajar dan hidup. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami dampak perang saudara tersebut terhadap mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa di Sudan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa menghadapi tantangan yang dihadapi akibat konflik di Sudan, termasuk dampak psikologis, akademis, dan sosial yang mereka alami. Dengan memahami dampak-dampak ini, akan menjadi mungkin untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut serta untuk memperbaiki program-program beasiswa yang ada. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana konflik bersenjata di negara asing

dapat memengaruhi mahasiswa asing yang berada di negara tersebut, yang dapat menjadi referensi penting dalam konteks studi lebih lanjut tentang krisis global dan mobilitas pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang dampak konflik di Sudan pada mahasiswa Indonesia yang sedang mengejar pendidikan di negara tersebut, serta memberikan masukan konstruktif kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemberi beasiswa, dan lembaga pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang relevan terkait dampak konflik Sudan terhadap perekonomian dan mahasiswa Indonesia penerima beasiswa di Sudan. Penulis juga mempersiapkan tinjauan literatur dengan merujuk kepada berbagai sumber elektronik, termasuk artikel dan jurnal, guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang seberapa besar dampak konflik Sudan tersebut terhadap perekonomian dan mahasiswa Indonesia yang beasiswa di Sudan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konflik Sudan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi

Bank Dunia menyatakan bahwa pemisahan Sudan Selatan telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Terutama, kerugian pendapatan dari sektor minyak, yang sebelumnya menjadi penyokong utama pemerintah Sudan, menyumbang lebih dari setengah pendapatan dan 95 persen dari total ekspor. Dampaknya melibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sudan dan peningkatan inflasi konsumen hingga mencapai angka dua digit. Kenaikan harga bahan bakar juga menjadi pemicu protes massal pada bulan September 2013. Laporan Bank Dunia Macro Poverty Outlook untuk Sudan per April 2023 menunjukkan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Oktober 2021 telah menurunkan aktivitas ekonomi di dalam negeri, menghambat kemajuan penyelesaian utang.

Meskipun demikian, pada tahun 2022, Bank Dunia memperkirakan bahwa kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) Sudan akan melambat menjadi 1%. Hal ini dipicu oleh stabilitas produksi sektor pertanian dan peternakan, serta pertumbuhan moderat dalam ekspor emas. Pada tahun 2022, Bank Dunia mencatat PDB Sudan sekitar USD 51,7 miliar dengan PDB per kapita mencapai USD 1.102,2. Namun, proyeksi untuk tahun 2023

menunjukkan pemulihan ekonomi yang lambat, diperkirakan sekitar 0,4%. Ini disebabkan oleh kesulitan dalam menyelesaikan krisis politik dan sosial yang berkelanjutan, serta ketidakamanan yang masih berlanjut. Bank Dunia memprediksi rata-rata pertumbuhan PDB Sudan mencapai 2% antara tahun 2023 dan 2025, didorong oleh peningkatan hasil pertanian dan ekspor peternakan, serta sektor pertambangan dan jasa.

Selain itu, Bank Dunia mencatat bahwa inflasi di Sudan diharapkan terus mengalami penurunan. Ini diperkuat oleh upaya otoritas negara untuk menanggulangi defisit fiskal dan membatasi monetisasi. Pada tahun 2022, inflasi tahunan rata-rata Sudan mengalami penurunan signifikan, turun dari 359,7 persen pada tahun 2021 menjadi 164,2 persen. Penurunan ini dipicu oleh perlambatan pertumbuhan uang yang disebabkan oleh pengurangan monetisasi. Selain itu, permintaan domestik yang rendah juga memberikan kontribusi terhadap perlambatan laju inflasi. Meskipun demikian, diperkirakan bahwa tingkat inflasi di Sudan akan tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekurangan pasokan di tingkat domestik, didukung oleh tingginya tingkat impor, serta kenaikan harga barang konsumsi dan input produksi. Upaya untuk menanggulangi inflasi akan tetap menjadi fokus pemerintah, terutama melalui kebijakan fiskal dan upaya mengelola sirkulasi uang.

Cadangan internasional bruto Sudan mengalami penurunan menjadi sekitar USD 1,2 miliar pada tahun 2022, setara dengan 1,4 bulan impor, dibandingkan dengan angka USD 1,63 miliar pada akhir 2021. Meskipun data kemiskinan resmi tidak tersedia setelah tahun 2014, persentase penduduk Sudan yang hidup dengan biaya kurang dari USD 2,15 per hari (PPP 2017) diperkirakan meningkat secara signifikan, dari 20,4 persen pada tahun 2018 menjadi 32,9 persen pada tahun 2023. Bank Dunia menunjukkan bahwa krisis yang berlarut-larut di Sudan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem, yang diperkirakan mencapai peningkatan sebesar 12 poin persentase. Dengan berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Sudan, mengelola kemiskinan menjadi salah satu aspek kritis yang harus diatasi oleh pemerintah dan lembaga terkait (Bank, 2023).

Sebuah laporan dari Kementerian Perdagangan China pada Januari 2022 mencatat keterlibatan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan China dalam proyek infrastruktur di Sudan, mendominasi lebih dari 50 persen pasar kontrak lokal. Pada akhir tahun 2020, nilai kontrak kumulatif perusahaan-perusahaan China melewati angka USD 30 miliar atau sekitar Rp 445,07 triliun (dengan asumsi kurs 14.835 per dolar AS), dan sebagian besar dari nilai tersebut, yaitu USD 20 miliar atau sekitar Rp 296,71 triliun, telah selesai. Perusahaan-perusahaan besar China seperti China National Petroleum Co, China Three Gorges Co, dan China International Water & Electric .

## 2. Dampak Konflik Terhadap Mahasiswa Indonesia di Sudan

Perang saudara di Sudan telah menciptakan ketidakstabilan dan mengancam keamanan, mendorong sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk mengevakuasi warganya dari negara tersebut. Lebih dari 800 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Sudan, baik melalui skema beasiswa maupun biaya mandiri, juga menjadi bagian dari evakuasi ini.

Kelancaran proses belajar dan kelanjutan studi mereka terganggu akibat dampak perang di Sudan. Sejumlah mahasiswa yang baru saja dievakuasi dari Sudan mencari dukungan dan nasihat terkait kelanjutan pendidikan mereka. Pada pertemuan dengan pengurus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Ulama (LPT PBNU), mahasiswa berbagi pengalaman mereka selama perang, proses evakuasi, dan kondisi terkini mereka.

Dalam pertemuan tersebut, Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Sudan, Althof Madani Ahsin, bersama dengan mahasiswa, bertemu dengan Ketua LPT PBNU, Ainun Na'im, dan pengurus lainnya. Mahasiswa menyampaikan ketidakpastian mereka terkait kembali ke daerah masing-masing setelah dievakuasi oleh TNI AU dari Sudan.

Mahasiswa sangat ingin melanjutkan studi mereka, meskipun diprediksi konflik di Sudan akan berlangsung lama. Menanggapi keinginan ini, Ainun menunjukkan bahwa melanjutkan studi di perguruan tinggi Indonesia dengan program-program studi yang relevan adalah opsi yang terbuka. Widya Priyahita, pengurus LPT PBNU, menegaskan kesiapan LPTNU untuk membantu mahasiswa yang memilih opsi ini, memudahkan mereka melanjutkan proses pembelajaran tanpa harus mengulang dari awal.

Meskipun opsi melanjutkan studi ke luar negeri masih terbuka, Ifan Haryanto, pengurus LPT PBNU, menyoroti bahwa opsi melanjutkan studi di dalam negeri menjadi pilihan yang lebih efisien dan realistis. Meskipun situasi konflik di Sudan antara militer Sudan dan Paramiliter Sudan Rapid Support Forces (RSF) telah mereda, opsi ini memberikan stabilitas dan kemudahan bagi mahasiswa.

Perang saudara yang terjadi sejak 15 April 2023 di Sudan telah mengakibatkan situasi keamanan yang genting, menyebabkan KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada 16 April 2023, yang kemudian ditingkatkan menjadi Siaga I pada 20 April 2023. Evakuasi WNI dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan ratusan WNI tiba di Indonesia secara bertahap pada akhir April dan awal Mei 2023.

Dalam situasi yang penuh tantangan ini, mahasiswa Indonesia yang dievakuasi dari Sudan mencari arah untuk melanjutkan pendidikan mereka. LPT PBNU menawarkan

dukungan dan opsi yang memungkinkan mereka tetap fokus pada pengembangan diri dan pendidikan, meskipun di tengah ketidakpastian yang dihadapi oleh negeri Sudan yang terus berkonflik.

### 3. Identifikasi Perubahan Dalam Kebijakan Beasiswa atau Dukungan Untuk Mahasiswa Indonesia di Tengah Konflik Sudan

Pemerintah Indonesia merespons evakuasi lebih dari 9.000 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sudan, dengan mayoritas di antaranya adalah mahasiswa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan beasiswa untuk mendukung kelanjutan pendidikan para mahasiswa yang menjadi korban konflik di Sudan.

Dalam wawancara di Bandara Internasional Sams Sepinggang Balikpapan, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya evakuasi WNI di Sudan untuk kembali ke Indonesia. Namun, evakuasi hanya dilakukan untuk mereka yang setuju, mengingat masih ada sejumlah warga Indonesia yang enggan kembali.

Pemerintah saat ini menekankan prioritas pada keselamatan WNI di Sudan, memastikan evakuasi dilakukan dengan aman. Terkait kelanjutan pendidikan mahasiswa Indonesia di Sudan, pembahasan akan dilakukan setelah dipastikan tidak ada lagi WNI yang terancam akibat konflik berdarah di Sudan.

Muhadjir Effendy menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keamanan dan kesejahteraan WNI, sambil terus menjalin komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di Sudan untuk menangani barang dan dokumen penting yang masih tertinggal di sana. Untuk mengatasi kendala seperti ijazah yang mungkin tertinggal, pemerintah akan menerbitkan surat pengganti ijazah untuk memastikan para mahasiswa Indonesia dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Meskipun pemerintah menyiapkan skema pembiayaan beasiswa, Muhadjir Effendy menekankan bahwa langkah-langkah konkrit terkait kelanjutan studi mahasiswa akan dibahas lebih lanjut setelah situasi keamanan dan evakuasi selesai. Dalam konteks ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan dan solusi bagi para mahasiswa yang terdampak konflik di Sudan (Fuad Iqbal Abdullah, 2023).

### 4. Intervensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa ) dan Gencatan Senjata Terhadap Pasukan Militer dan RSF (*Rapid Support Forces*)

Berdasarkan konflik antara Tentara Sudan dan RSF (*Rapid Support Forces*) tersebut di atas, tentunya hal ini mendapat perhatian dunia internasional sehingga memicu konflik kemanusiaan. Dalam hal ini, peran organisasi perdamaian dunia atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional terkait

gangguan perdamaian dan keamanan internasional. Peran PBB dalam hal ini adalah melindungi rakyat Sudan dan masyarakat internasional dari bencana perang ini.

Dewan Keamanan PBB seharusnya mencari solusi dan mengambil resolusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Sudan, karena pada dasarnya ini adalah masalah internal, tetapi telah mencapai titik yang mengancam perdamaian internasional. Itulah mengapa PBB harus turun, karena jika PBB tidak melindunginya, maka banyaknya intervensi eksternal yang dikhawatirkan memiliki kepentingan di Sudan akan memperburuk situasi di Sudan.

Hal ini dilaksanakan oleh PBB dan Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peran utama Dewan Keamanan terdapat dalam Pasal 4(1) Piagam PBB, yang mengatakan: "Agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan segera dan efektif. Negara-negara Anggota mempercayakan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama untuk pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan dan setuju bahwa Dewan Keamanan harus bertindak atas nama Negara-negara Anggota dalam memenuhi tugasnya". Kebutuhan antar Negara menimbulkan timbal balik, menjaga kepentingan yang dapat mengatur hubungan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan bersama.

Untuk memecahkan masalah perdamaian internasional dan keamanan. Dewan Keamanan PBB berusaha menyelesaikannya dengan cara negosiasi atau perundingan yang sering digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan antar negara. Hal ini dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang mengalami kesulitan tanpa melibatkan pihak lain dan tanpa mencapai kesepakatan (Rahma).

Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa ada kemungkinan kedua belah pihak bersedia untuk berbicara di Arab Saudi. Namun serangan udara dan artileri masih terdengar di Khartoum dan kota-kota tetangga. Pada tanggal 24 April sampai 27 April, gencatan senjata disepakati oleh kedua belah pihak. Gencatan senjata menyepakati bahwa negara-negara asing akan memiliki waktu untuk mengevakuasi warganya. Pada tanggal 22 Mei 2023, tentara setuju untuk bernegosiasi. Pasukan militer dan paramiliter setuju untuk mengamati gencatan senjata selama tujuh hari. Tujuannya agar bantuan kemanusiaan sampai ke Sudan. Kesepakatan gencatan senjata juga untuk pertama kalinya memasukan mekanisme pemantauan yang melibatkan angkatan darat dan RSF, serta perwakilan Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS). Pihak-pihak yang menjadi perantara kesepakatan akan mengadakan negosiasi di Jeddah. Gencatan senjata sementara bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk bergerak maju dalam negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen dan proses politik baru yang dipimpin dan dilakukan oleh Sudan sendiri.

## SIMPULAN

1. Konflik di Sudan, khususnya pemisahan Sudan Selatan, telah menyebabkan dampak ekonomi signifikan. Kerugian pendapatan dari sektor minyak, kontraksi PDB, dan peningkatan inflasi menjadi tantangan utama. Meskipun terdapat proyeksi pemulihan, ketidakpastian politik dan ketidakamanan tetap menjadi hambatan.
2. Mahasiswa Indonesia di Sudandievakuasi karena konflik, menghadapi tantangan serius terkait kelangsungan pendidikan mereka. LPT PBNU menawarkan dukungan untuk melanjutkan studi, dengan opsi di dalam negeri dianggap lebih efisien. Konflik tersebut telah mengganggu kehidupan akademis mereka, dan para mahasiswa berjuang untuk menentukan arah masa depan studi mereka.
3. Perlunya intervensi PBB dalam menangani konflik Sudan disoroti, dengan penekanan pada peran Dewan Keamanan PBB. Gencatan senjata antara pasukan militer dan RSF dianggap sebagai langkah positif, memberikan kesempatan bagi evakuasi dan bantuan kemanusiaan. Meskipun bukan solusi akhir, ini menjadi titik awal untuk negosiasi lebih lanjut dan pembentukan proses politik yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (1993). *Sistem Kaderisasi Ikhwan Al-Muslimin*, Terjemahan Ghazali Mukri. Pustaka Mantiq.
- Al-Qardhawi, Y. (2009). *Fiqh Jihad*. Wahba Bookshop.
- Aslamiyah, Mujadidah, Soekotjo Hardiwinoto, dan Joko Setiyono. 2016. "PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERANG (STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN)." *DIPONEGORO LAW REVIEW*. Vol. 5.
- Bank, W. (2023). *Macro Poverty Outlook for Sudan : April 2023 (English)*. World Bank Group.
- Besheer, M. (Ed.). (2023, Mei 23). Retrieved Mei 28, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-desak-para-pihak-yang-bertikai-di-sudan-untuk-terlibat-dialog/7105189.html>
- Fuad Iqbal Abdullah. (2023). *Menko PMK: Pemerintah Akan Siapkan Beasiswa Bagi Mahasiswa Indonesia Korban Konflik Sudan*. <https://www.beritasatu.com/nasional/1042421/menko-pmk-pemerintah-akan-siapkan-beasiswa-bagi-mahasiswa-indonesia-korban-konflik-sudan>
- Maharani, E. (Ed.). (n.d.). Retrieved Mei 28, 2023, from <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/khartoum-mulai-tenang-seusai-gencatan-senjata-berlaku/ar-AA1bzbDO>

- Mulyanti, Dewi. 2018. "MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan)." Vol. 6.
- Rahma, Fathia Firli. t.t. "Peranan PBB Dalam Penyelenggaraan Hukum Internasional."  
Retrieved April 28, 2023, from CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230417164458-127-938908/siapa-rfs-pasukan-paramiliter-biang-perang-saudara-di-sudan/1>
- Sarsito, T. (2009). Perang dalam Tata Kehidupan Antarbangsa. *Jurnal Komunikasi Massa*, 2(2), 112–126. <http://ancok>.
- Sidik Jatmika, M Si, Mata Kuliah, Hubungan Internasional, dan Di Timur Tengah. 2015. "ENSIKLOPEDIA NEGARA SUDAN STUDI KASUS: KEANEKARAGAMAN ETNIS DAN PEREBUTAN KEKAYAAN ALAM SEBAGAI PEMICU KONFLIK DI DARFUR (2003)."  
<http://www.kemlu.go.id/khartoum/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=2&l=id>.
- Suhartono, A. (Ed.). (2023, Mei 01). Retrieved Mei 28, 2023, from iNews.id:  
<https://www.inews.id/news/internasional/pbb-peringatkan-konflik-sudan-semakin-parah-meski-gencatan-senjata-diperpanjang/2>
- Taskiyah, Talita, dan Felicia Meigen. 2021. "PERAN PBB DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA SUDAN SELATAN DAN SUDAN UTARA." (Maharani, n.d.)
- Yudistira, A. (2015). *Perang Sipil Spanyol 1936-1939: Pergolakan Ideologi dan Intervensi Asing*. Kentja Press.